



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SKEMA.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH DAN ISTILAH KHUSUS	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR ISTILAH KHUSUS	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
INTISARI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
1.4 Ruang Lingkup.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka	16
1.6 Kerangka Teori.....	21
1.6.1 AWKK sebagai Kerangka Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Guru	24
1.6.2 Analisis Linguistik dan Konteks Situasi (Halliday & Matthiessen) dan Intertekstualitas (Teun van Dijk) sebagai Landasan Integrasi Mikro-Meso	29
1.6.3 Level Makro: Analisis Ideologi (van Dijk).....	39
1.6.4 Sintesis dan Penutup Kerangka Teori	42
1.7 Metode Penelitian.....	43
1.7.1 Jenis Penelitian.....	43
1.7.2 Data dan Sumber Data	45
1.7.3 Pengumpulan Data	46
1.7.4 Analisis Data	50
1.7.5 Penyajian Hasil Analisis Data	56
1.8 Organisasi Penyajian.....	58
BAB II FITUR-FITUR LINGUISTIK POSISI GURU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	61
2.1 Pengantar.....	61
2.2 Leksis Partisipan yang Terlibat.....	62
2.2.1 Guru	64
2.2.2 Pemerintah	71
2.2.3 Masyarakat	76
2.3 Penggunaan Verba	79
2.3.1 Modalitas.....	80



2.3.2 Penggunaan Verba Pasif	90
2.3.3 Proses Relasional	93
2.3.4 Proses Verbal	103
2.3.5 Proses Material.....	114
2.4 Penggunaan Klausa	121
2.4.1 Klausa Simpleks.....	123
2.4.2 Klausa Kompleks	125
2.5 Penggunaan Nominalisasi	141
2.6 Penutup.....	148
BAB III KONTEKS SITUASI DALAM WACANA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG GURU	150
3.1 Pengantar.....	150
3.2 Medan Teks (Fungsi Ideasional).....	154
3.2.1 Konteks Situasi pada Proses Relasional.....	155
3.2.2 Konteks Situasi pada Proses Verbal.....	160
3.2.3 Konteks Situasi pada Proses Material	164
3.3 Pelibat (Fungsi Interpersonal).....	173
3.3.1 Modalitas wajib: Representasi kekuasaan Asimetris dan Disparitas Struktural ...	176
3.3.2 Modalitas dapat: Ketidaktegangan Tanggung Jawab dan Penghindaran Komitmen Negara	177
3.3.3 Modalitas berhak: Legitimasi Formal atas Ketidakadilan Struktural Penggunaan	180
3.4 Moda Teks (Fungsi Tekstual)	183
3.4.1 Penggunaan Kalimat Deklaratif	183
3.4.2 Penggunaan Kalimat Imperatif.....	192
3.4.3 Penggunaan Kalimat Preskriptif dan Prosedural.....	197
3.5 Penutup.....	203
BAB IV IDEOLOGI DALAM WACANA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG GURU	206
4.1 Pengantar	206
4.2 Legitimasi Kekuasaan dalam Perundangan tentang Guru	208
4.3 Penyembunyian Agen dalam Wacana Perundangan.....	218
4.4 Polarisasi Ideologis dalam Pembagian Status Guru.....	226
4.5 Ketimpangan Status Kepegawaian sebagai Pembentuk Identitas Profesional Guru	231
4.6 Penutup	238
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	242
5.1 Kesimpulan	242
5.2 Saran	249
DAFTAR RUJUKAN	251